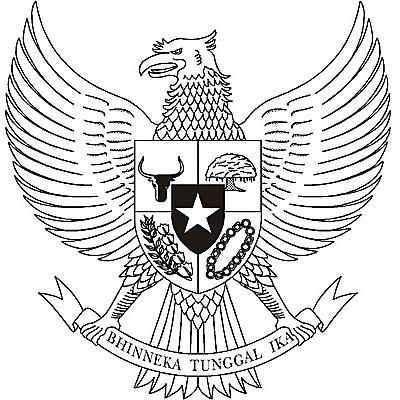
****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]   |  | | --- | | KEPUTUSAN KEPALA DESA [NAMA DESA]  NOMOR : ......TAHUN [....]  TENTANG  TIM PENGADAAN KEGIATAN BARANG/JASA  TAHUN ANGGARAN [....]  KEPALA DESA [NAMA DESA]; | |  | | | | |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka pengadanaan barang/jasa pada DESA [Nama Desa] diperlukan Tim Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku; |
|  |  | b. | bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DESA (PKPKK) DESA [Nama Desa]; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 2. | Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019  tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana  sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641; |
|  |  | 8. | Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati ............. Nomor ........... Tahun ........... tentang Pengelolaan Keuangan di.... (nama kabupaten); |
|  |  | 10. | Keputusan Kepala Desa Nomor .............tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa pada Desa......; |
|  |  | 11. | Dll... |
| **MEMUTUSKAN** | | | |
| Menetapkan | : | **KEPUTUSAN KEPALA DESA [NAMA DESA] TENTANG TIM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN [....]** | |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dengan honor per bulan dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini. | |
| KEDUA | : | Menugaskan kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari, yaitu :   1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui website remi desa dan papan infomasi untuk masyarakat desa; 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. Menetapkan penyedia barang dan jasa; 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kaur dan Kasi/Sekretaris Desa/Pimpinan BPD/Kepala Desa; dan 9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PTPKD/PPKD. | |
| KETIGA | : | Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada APB Desa.........Tahun Anggaran 2021. | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ....,.......2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliriuan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  | | | |
| Ditetapkan di [Nama Desa]  Pada tanggal [Tgl,Bln, dan Thn]  KEPALA DESA [NAMA DESA]    [ NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT]  Diundangkan di [Nama Desa]  Pada tanggal [Tgl,Bln, dan Thn]  SEKRETARIS DESA  [ NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT]  BERITA DESA [NAMA DESA] NOMOR ......TAHUN [....]  Tembusan :   1. Arsip; 2. Yang bersangkutan. | | | |

Lampiran : Keputusan Kepala Desa [Nama Desa]

Nomor : ..........Tahun [....]

Tanggal : [Tgl,Bln, dan Thn][....]

**TIM PENGELOLA BARANG/ JASA**

**DESA [NAMA DESA] TAHUN ANGGARAN [....]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1 |  | Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa |
| 2 |  | Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa |
| 3 |  | Anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa |
| 4 |  | Anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa |

KEPALA DESA [NAMA DESA]

[ NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT]